
SEJARAH KORPRI

KORPRI lahir pada 29 November 1971 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971, dibentuk untuk merespons dinamika birokrasi yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.

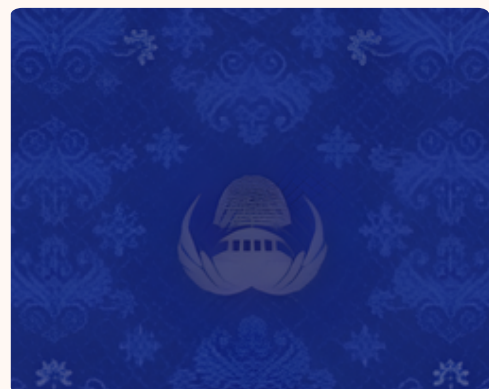
Pada periode tersebut, birokrasi Indonesia mengalami intervensi politik yang kuat dari berbagai partai, sehingga melemahkan profesionalisme pegawai negeri.



Pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), pegawai negeri mengalami loyalitas ganda, terikat pada atasan dan juga partai politik masing-masing. Hal ini menyebabkan birokrasi tidak stabil serta rentan konflik kepentingan. Situasi serupa berlanjut pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), saat ideologi NASAKOM memperkuat dominasi partai politik di dalam tubuh birokrasi negara.

Setelah memasuki era Orde Baru, pemerintah berupaya menata kembali birokrasi melalui sistem karir, profesionalisme, dan netralitas pegawai negeri. Untuk membangun kekompakan dan kesatuan aparatur negara, KORPRI kemudian dibentuk sebagai satu-satunya organisasi resmi yang menghimpun seluruh pegawai negeri di luar kedinasan.

Dalam perjalanannya, KORPRI juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai program seperti pengembangan kompetensi, peningkatan etos kerja, dan dukungan sosial. KORPRI turut menggalakkan gerakan ASN BerAKHLAK yang menekankan nilai-nilai pelayanan, akuntabilitas, harmoni, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif.



Hingga saat ini, KORPRI tetap menjadi organisasi yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan semangat pengabdian, KORPRI terus berupaya mendorong profesionalisme, integritas, dan kualitas birokrasi agar mampu menjawab tantangan zaman serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.